

Implementasi Of The Youth Posyandu Program In The Petahunan District, Pasuruan City

Implementasi Program Posyandu Remaja Di Kelurahan Petahunan Kota Pasuruan

Chyntia Febrianti Wiyanto¹⁾, Ilmi Usrotin Choiriyah²⁾

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: ilmiusrotin@umsida.ac.id.

Abstract. *This research aims to determine the implementation of the Youth Posyandu Program in Petahunan Village, Pasuruan City. This research uses qualitative descriptive. Data collection techniques are interviews, observation and documentation. The data analysis technique used by the Miles and Huberman model is through data collection, data reduction, and data presentation and drawing conclusions. Research findings show that the implementation of the youth posyandu program in the Perandu sub-district of Pasuruan City still does not meet the variables of communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The results of the research on the implementation of the youth posyandu program were reviewed from four indicators, namely, 1). Communication has been implemented but there are still deficiencies in delivery. 2). Human resources in this indicator include the head of the youth posyandu program, village officials together with related officers, and facility and budget resources including facilities and infrastructure. 3). Disposition, in this indicator, is the effort and desire of the head of the youth posyandu program together with Petahunan sub-district officials in creating a youth posyandu program. 4). Bureaucratic structure, in this indicator village officials and youth Posyandu in Petahunan Village.*

Keywords - Implementation; Posyandu Program, Youth

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Posyandu Remaja di Kelurahan Petahunan Kota Pasuruan. Dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan model Miles dan Huberman melalui pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data serta penarikan kesimpulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi program posyandu remaja di kelurahan petahunan kota Pasuruan masih belum memenuhi variabel komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil dari penelitian implementasi program posyandu remaja ditinjau dari empat indikator yaitu, 1). komunikasi sudah terlaksana namun masih ada kekurangan dalam penyampaiannya. 2). Sumber daya manusia dalam indikator ini meliputi ketua program posyandu remaja, aparatur desa bersama petugas terkait, dan sumber daya fasilitas dan anggaran meliputi sarana dan prasarana. 3). Disposisi, pada indikator ini usaha dan keinginan ketua program posyandu remaja bersama Aparatur kelurahan Petahunan dalam membuat program posyandu remaja. 4). Struktur birokrasi, pada indikator ini Aparatur desa dan Posyandu remaja di Kelurahan Petahunan.*

Kata Kunci - Implementasi; Program Posyandu; Remaja

I. PENDAHULUAN

Remaja sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran yang begitu penting dalam melanjutkan pembangunan negara. Menurut data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017 tercatat penduduk Indonesia sebanyak 9,3% termasuk dalam rentan usia 10 - 14 tahun, dan 8,3% dalam rentan usia 15 - 19 tahun. Masa remaja adalah fase peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Data BPS 2022 menunjukkan bahwa kelompok usia ini menyumbang hampir seperempat penduduk Indonesia, mencerminkan gambaran masa depan bangsa. Sehingga penting untuk selalu memperhatikan kualitas remaja pada saat ini. Pada masa remaja saat ini banyak menghadapi tantangan dari luar maupun datangnya dari dalam dirinya sendiri. Apabila remaja tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan tersebut maka akan timbul sikap dan perilaku yang menyimpang, sehingga dikhawatirkan muncul masalah - masalah yang kompleks terutama masalah kesehatan.

Berdasarkan hasil survey Demografi Kesehatan Indonesia 2012 Komponen Kesehatan Reproduksi Remaja (SDKI 2012 KRR), Bahwa secara nasional terjadi peningkatan angka remaja yang pernah melakukan hubungan seksual pranikah dibandingkan dengan data hasil Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia (SKRRI) 2007. Hasil survei SDKI 2012 KRR menunjukkan bahwa sekitar 9,3% atau sekitar 3,7% juta remaja menyatakan pernah melakukan hubungan seksual pranikah, sedangkan hasil KRRI 2007 hanya sekitar 7% atau sekitar 3 juta remaja. Sehingga selama

periode tahun 2007 sampai 2012 terjadi peningkatan kasus remaja yang pernah melakukan hubungan seksual sebanyak 2,3%. Perilaku seks bebas dikalangan remaja berdampak pada kasus penularan penyakit kelamin salah satunya HIV/AIDS yang cenderung berkembang di Indonesia. Berdasarkan Ditjen PP & PL kementkes RI, secara kumulatif penderita HIV/AIDS 1 April 1987 sampai 30 september 2014 jumlah penderita HIV sebanyak 150.292 jiwa dan penderita AIDS sebanyak 55, 779 jiwa dimana 9.796 jiwa diantara lainnya mengalami kematian. Proporsi kumulatif kasus AIDS tahun 1987 - 2014 tertinggi dilaporkan pada kelompok umur 20 - 29 tahun sebanyak 18.352 jiwa. Hal ini merupakan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia menderita penyakit ini dimulai masa remaja, sedangkan jumlah kasus AIDS pada usia 15 - 19 tahun sebesar 24.717 jiwa.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 25 tahun 2014 bahwa setiap anak usia sekolah dan remaja harus diberikan pelayanan dan kesehatan. Kementerian Kesehatan telah mengembangkan pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di Puskesmas, tetapi pelayanan digedung yang diberikan oleh tenaga kesehatan masih memiliki keterbatasan jumlah sarana dan hambatan terkait akses karena geografis yang beragam, hal tersebut membutuhkan upaya pemberdayaan masyarakat berupa turut serta masyarakat secara mandiri dalam upaya promotif serta preventif, misalnya kegiatan seperti posyandu remaja (Kemenkes RI, 2018). Melalui kegiatan pembentukan Posyandu Remaja diharapkan dapat menjadi tempat bagi para remaja untuk memiliki pemahaman serta kemampuan dalam memecahkan permasalahan kesehatannya. Tujuan awal berdirinya Posyandu Remaja adalah memantau kesehatan dan memberikan informasi kesehatan bagi remaja, menurunkan angka pernikahan dini, serta meningkatkan kapasitas dan partisipasi remaja dalam pembangunan (Tempo.com, Juni 2018 dalam Lestari dkk, 2018).

Kota Pasuruan, Jawa Timur adalah salah satu kota yang antusias dalam terbentuknya posyandu remaja apalagi adanya dukungan dari bapak Walikota Pasuruan Saifullah Yusuf yang merencanakan tiga Program kolaborasi dalam mewujudkan generasi kuat dan sehat salah satunya berdirinya posyandu remaja. Posyandu Remaja merupakan inisiatif positif yang awalnya berjalan di Pasuruan, Jawa Timur. Dengan kerjasama desa, Puskesmas, dan Dinas Kesehatan, kegiatan ini dijalankan oleh organisasi remaja yang disebut Laskar pencerah. Posyandu remaja telah menjangkau 6 desa dengan 8 pos untuk kegiatan posyandu. Remaja berasal dari Desa Tosari yang dipimpin oleh Yoga Andika. Yoga Andika adalah penerima penghargaan Semangat Astra Terpadu Untuk Indonesia Awards 2016. Posyandu Remaja didirikan dengan tujuan utama untuk memonitor kesehatan, memberikan informasi kesehatan kepada remaja, menurunkan angka pernikahan dini, dan meningkatkan partisipasi remaja dalam Pembangunan Desa Tosari. Yoga, pemimpin Laskar Pencerah, mendapati tingginya angka pernikahan dini di desanya, berdampak negatif pada kualitas kehidupan remaja. Melihat masalah seperti kekerasan dalam rumah tangga, risiko kematian saat melahirkan, dan dampak psikologis, Yoga merasa perlu untuk melakukan pencegahan. Selain fokus pada kesehatan fisik dan mental remaja, Yoga menyadari keterbatasan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan. Meskipun bukan bertugas medis profesional, Yoga dan timnya aktif memberikan penyuluhan dalam kegiatan posyandu bulanan di desa mereka dan sekitarnya. Mereka mempersiapkan diri dengan pengetahuan dan pelatihan dari puskesmas.

Berdasarkan data Pemerintah Kota Pasuruan memiliki 4 kecamatan dan memiliki 34 kelurahan dan masing-masing kelurahan diharuskan ada posyandu remaja. Posyandu Remaja merupakan langkah yang diambil untuk menuntaskan masalah kesehatan teraktual yang dihadapi di Kelurahan Petahunan. Gagasan ini datang karena, berdasarkan temuan lapangan menyebutkan bahwa presentase remaja meroko sebesar 50% pada tingkat SMP dibandingkan dengan tingkat SD yaitu sebesar 20% dan tingkat SMK sebesar 15% sisanya remaja menikah diusia dini. Secara konseptual, fasilitas Posyandu Remaja berfungsi memberikan kemudahan pelayanan kesehatan dan keterampilan hidup sehat dalam bentuk sosialisasi kesehatan remaja serta pencegahan kenakalan remaja.

Pada tahun 2020 posyandu remaja terbentuk di Kelurahan Petahunan Kecamatan Gadingrejo Pasuruan. Posyandu remaja di kelurahan petahunan sudah mendapatkan surat keputusan kelurahan dan kecamatan dan didukung oleh Walikota Pasuruan. Dalam pelaksanaan kegiatan posyandu remaja dilakukan 1 tahun dua kali yang dilaksanakan pada awal tahun dan akhir tahun untuk setiap posyandu melibatkan 2 petugas dan didampingi satu bidan desa sebagai pelaksanaan program untuk setiap posyandu dan kader untuk membanyu kegiatan di 5 buah meja yang disiapkan sesuai dengan tugas masing – masing. Adapun struktur kepengurusan Posyandu Remaja Kelurahan Petahunan disusun sebagai berikut:

Tabel 1.1
Susunan Kepengurusan Posyandu Remaja Wilayah Kelurahan Petahunan

No.	Nama	Jabatan
1.	Asih	Pelindung
2.	Badrus Salam	Penasehat
3.	Joko Miarso	Pembina
4.	Sri Rahayu	Ketua
5.	Rini Ayunda	Sekretaris

6.	Maimunah	Bendahara
7.	Adji Setiawan	Meja I Pendaftaran
8.	Anggit Widarto	Meja II Pengukuran
9.	Isma Maulidiah	Meja III Pelayanan
10.	Maulana	Meja IV Pencatatan
11.	Retha Martha	Meja V KIE
12.	Fifi Yuniar	Meja V KIE

Sumber: Data Posyandu Remaja Kelurahan Petahunan

Posyandu di Kelurahan Petahunan sudah berhalan rutin selama 2020 hingga 2023 namun masih terdapat kendala seperti jadwal penyelenggaraan posyandu remaja yang tidak menentu setiap bulannya meskipun masih rutin dilaksanakan adanya partisipasi peserta remaja yang belum mencapai target. Adapun gambaran peserta pelaksanaan Posyandu Remaja dari tahun 2020 hingga 2023 sebagai berikut.

Tabel 1.2
Jumlah Peserta Posyandu Remaja Pada tahun 2020 -2023

No	Tahun	Peserta Posyandu Remaja		Jumlah Remaja
		Maret	November	
1.	2020	30	45	496 Remaja
2.	2021	50	48	539 Remaja
3.	2022	55	55	550 Remaja
4.	2023	35	28	594 Remaja

Sumber: Data Posyandu Remaja Kelurahan Petahunan

Berdasarkan data diatas peserta yang mengikuti posyandu remaja setiap pertemuan semakin menurun. Sasaran Posyandu mandiri remaja usia SD SMP hingga SMA. Materi penyuluhan meliputi sosialisasi tentang pernikahan dini, bahaya seks pra nikah, efek negatif miras nikotin serta budaya hidup sehat dan menjaga kebersihan lingkungan. Tercatat tingkat SD, tingkat SMP dan tingkat SMA yang siswa - siswanya rutin diberi penyuluhan di posyandu remaja Kelurahan Petahunan.

Pelaksanaan program posyandu remaja ini dilakukan pada bulan maret pertengahan dan akhir tahun. Pelaksanaan program ini dalam satu tahun dilakukan 2 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama biasanya akan dilaksanakan pengecekan kesehatan pada remaja secara keseluruhan. Pengecekan ini dilakukan sebagai bentuk screening awal untuk mengetahui kesehatan remaja pada awal program dilaksanakan. Pada pertemuan kedua atau selanjutnya remaja akan diberikan masukan dan nasehat mengenai kesehatan berdasarkan hasil dari screening kesehatan yang dilakukan pada pertemuan awal. Setelah selesai remaja akan didampingi dan dilakukan pendekatan pada remaja dengan penyampaian materi yang sesuai dengan beberapa kasus yang terjadi seperti kasus pernikahan dini maupun kasus remaja merokok.

Adapun tujuan didirikannya posyandu remaja di Kelurahan Petahunan yakni meningkatkan kemampuan remaja menuju kemandirian dalam sosial serta menjadi remaja yang beriman dan sehat. Adapun tujuan khususnya adalah, mencegah permasalahan yang timbul diusia remaja yang dapat berdampak buruk untuk kedepannya, seperti kehamilan diusi dini, seks bebas, dan narkoba. Meningkatkan kemauan hidup bersih dan sehat. Menjadi remaja yang berkualitas. Memberikan bekal keterampilan dan kreatifitas.

Implementasi kebijakan adalah salah satu komponen dari keseluruhan proses kebijakan publik. Menurut Mazmanian implementasi kebijakan diartikan sebagai pelaksanaan keputusan dalam kebijakan dasar yang dilakukan dalam bentuk undang-undang, perintah, dan keputusan. Keputusan tersebut biasanya mengidentifikasi masalah yang dihadapi, tujuan yang ingin dicapai, dan struktur dari proses implementasi. Jika proses implementasi telah berjalan maka diharapkan akan memunculkan suatu keluaran yaitu hasil segera (*effect*) dan dampak akhir (*impact*). Hasil segera dan dampak akhir yang timbul akan berguna untuk menilai implementasi dari suatu kebijakan tertentu [2].

Implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh beberapa pihak seperti pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok).

Komunikasi menurut George C Edward III (2004) merupakan proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Informasi mengenai kebijakan publik perlu untuk disampaikan kepada pelaksana kebijakan agar pelaksana kebijakan mampu mengetahui hal apa saja yang harus dipersiapkan dan dilakukan guna melaksanakan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat tercapai sesuai dengan harapan. Sumber daya menurut Edward III merupakan faktor yang memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan dan kewenangan[8]. Sikap atau Disposisi merupakan keinginan dan kecenderungan pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan dengan sungguh-sungguh guna mencapai tujuan kebijakan[8]. Struktur birokrasi merupakan instrumen yang diciptakan untuk menangani keperluan-keperluan publik. Dengan adanya struktur birokrasi maka implementasi kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya [8].

Pertama pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andriani et al (2023) yang berjudul “implementasi program posyandu remaja pada kalangan remaja di kelurahan Sudajaya Hilir” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan posyandu remaja yang berjalan masih memiliki hambatan dan masalah yang berdampak pada keterbatasan pelaksanaan yang masih kurang menarik partisipan remaja dan komunikasi dalam pihak yang berkaitan dengan permasalahan pendanaan [3]. Sumber daya manusia sudah mencakup secara kuantitas namun masih kurang secara kualitas. Persamaan penelitian ini yaitu terkait implementasi program posyandu remaja. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu mengenai tempat penelitian dimana peneliti terdahulu dilakukan di kelurahan Sudajaya sedangkan peneliti yang akan dilakukan oleh peneliti di Kelurahan Petahunan Pasuruan. Dengan adanya perbedaan tempat penelitian hasil penelitian bisa berbeda.

Kedua hasil peneliti Qisty et al (2023) yang berjudul “Analisis implementasi program pelayanan kesehatan peduli remaja (PKPR) di puskesmas Siulak gedang Kabupaten Kerinci ditulis oleh Letxya Qisty, Fadlan Kalma, dan Mat Ramawi tahun 2023”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program PKPR di puskesmas Siulak Gedang sudah dilakukan namun dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan baik dan maksimal. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya kenakalan remaja, pernikahan dini, remaja yang merokok, serta kurangnya sumber daya dan dana dalam pelaksanaan program tersebut. Persamaan penelitian ini yaitu mengenai implementasi program pelayanan kesehatan peduli remaja. Perbedaan yaitu perbedaan tempat dilaksanakannya penelitian serta pelaksanaan program.

Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahid et al (2020) “Gambaran pelaksanaan posyandu remaja di kelurahan Panggung Kidul Kecamatan Semangarang Utara”. Hasil dari penelitian ini yaitu dampak dari adanya kegiatan Posyandu Remaja masih belum terselaku dirasakan oleh masyarakat sekitar khususnya remaja sebagai sasaran dari kegiatan ini karena pelaksanaannya yang masih tergolong baru dan sempat bergenti dalam dua kali pelaksanaan terakhir ini. Persamaan penelitian ini yaitu mengenai bagaimana pelaksanaan dari program posyandu remaja. Perbedaan penelitian ini yaitu peneliti ingin meneliti lebih dalam mengenai implementasi program posyandu remaja ini dengan cara dari peneliti sebelumnya. Sehingga diharapkan hasilnya dapat lebih baik.

Terakhir berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (POSANGI et al., 2020) “Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Dilakukan Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow. Persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai komunikasi dalam implementasi kebijakan. Perbedaan penelitian ini yaitu beda subjek penelitian.

Untuk implementasi program posyandu remaja di Kelurahan Petahunan Kota Pasuruan peneliti telah menggunakan teori implementasi yang diungkap oleh George C Edward III (2004) dengan indikator yang terdiri dari Komunikasi, Sumber Daya, Sikap, dan Struktur Birokrasi. Permasalahan pertama pada Implementasi Program Posyandu Remaja di Kelurahan Petahunan yakni sarana dan prasarana pada posyandu remaja di kelurahan petahunan menjelaskan bahwa kondisi sarana dan prasarana masih belum lengkap dan masih tidak tersedianya fasilitas untuk meningkatkan operasional posyandu remaja dan partisipasi remaja di Kelurahan Petahunan dalam Posyandu Remaja masih kurang aktif, menunjukkan bahwa keikutsertaan mereka dalam program ini masih rendah, sementara layanan Posyandu Remaja yang ditawarkan belum cukup menarik.

Oleh karena itu, Kelurahan Petahunan Kota Pasuruan dipilih untuk menjadi lokasi penelitian terkait implementasi posyandu remaja tersebut. Sehingga, penulis mengangkat permasalahan tersebut dengan judul “Implementasi Program Posyandu Remaja di Kelurahan Petahunan Kota Pasuruan tahun 2023 “

II. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sanapiah Faisal[2] bahwa penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mengeksplorasi atau mengklarifikasi fenomena atau kenyataan sosial, dengan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkaitan dengan masalah objek yang diteliti tanpa memperlumahkan hubungan variabel yang ada. Fokus dalam penelitian ini yaitu

implementasi program posyandu remaja dengan indikator berdasarkan teori George C Edward III (2004) yaitu Komunikasi, Sumber Daya, sikap dan Struktur Birokrasi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan program posyandu remaja yang ada. Lokasi penelitian di Kelurahan Petahunan Kota Pasuruan. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi kelompok, analisis dokumen resmi, dan dokumentasi[1]. Wawancara dilakukan dengan wawancara semi terstruktur kepada informan utama pendiri posyandu remaja, dan peserta posyandu remaja. Instrument penelitian adalah peneliti sendiri, pedoman wawancara, dan catatan lapangan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif menurut Miles dan Hubberman [2]. Analisis data dengan model interaktif ini melalui 3 tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

III. PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi program posyandu remaja di kelurahan Petahunan Kota Pasuruan dengan Menurut teori implementasi program George Edward III, (1980) empat indikator-komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi memiliki dampak yang signifikan terhadap bagaimana kebijakan diimplementasikan. George Edward III telah menetapkan bahwa dalam hal implementasi program, komunikasi merupakan komponen yang paling penting untuk dipertimbangkan. Saluran komunikasi yang efektif akan meningkatkan efektivitas proses implementasi program. Gagasan ini melihat komunikasi sebagai kunci keberhasilan implementasi dan administrasi program karena betapa pentingnya hal tersebut

1. Komunikasi

Menurut George C. Edwards III, langkah pertama dalam menjalankan sebuah kebijakan atau program untuk mencapai berbagai tujuan adalah komunikasi (Bloom & Reenen, 2013). Pencapaian tujuan implementasi kebijakan publik juga ditentukan oleh komunikasi. Hubungan antara pemerintah dengan masyarakat perlu diselarakan menjadi dua arah. Agar para pembuat kebijakan tahu apa yang harus dilakukan, mereka perlu berkomunikasi. Komunikasi organisasi adalah proses penyediaan ide, informasi dan motivasi kepada anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini penyampai informasi yaitu Wali Kota Pasuruan sebagai pencetus ide Program posyandu Remaja. Setelah informasi dari Wali Kota Pasuruan disampaikan, pelaksana kegiatan dapat segera memulai program. Penyampaian informasi ini berfungsi sebagai komunikasi penting terkait pelaksanaan program Posyandu Remaja. Pada komunikasi kebijakan yang ditegaskan oleh George Edward III terdapat beberapa sub indikator yang harus diterapkan, agar implementasi kebijakan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu : transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

Transmisi, Penyampaian atau penyaluran komunikasi yang efektif dan jelas akan menghasilkan implementasi yang optimal dan berkualitas, karena setiap pihak yang terlibat dapat memahami dengan baik tujuan, strategi, dan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai hasil yang diinginkan [11]. Seperti yang sudah di jelaskan oleh Bu Sri rahayu, S.A.B. Selaku ketua dari Posyandu Remaja di Kelurahan Petahunan Kota Pasuruan.

“awalnya ide posyandu remaja ini dicetuskan oleh bapak wali kota pasuruan yaitu bapak syaifulloh yusuf mbak. Bpk walikota pasuruan dengan mengerahkan kandidatnya (BKKBN Kota pasuruan) untuk menggalakkan supaya remaja sehat dan berilmu. Di kelurahan petahunan sendiri memiliki beberapa permasalahan mbak seperti remaja yang menikah dini atau sebelum usia 19 tahun, banyak remaja yang merokok, dan kenakalan remaja lainnya. adanya permasalahan tersebut maka dibentuklah posyandu remaja pada tahun 2020”

Wawancara tersebut dilakukan pada tanggal 28 September 2023. Hasil dari pernyataan diatas bahwa para remaja di kelurahan petahunan sudah melaksanakan posyandu remaja tersebut. Berikut adalah gambaran dari pelaksanaan posyandu remaja di kelurahan petahunan kecamatan gadingrejo kota Pasuruan

Gambar 1. Pelaksanaan Posyandu Remaja di Kelurahan Petahunan.



Sumber: Instagram Kelurahan Petahunan Kota Pasuruan

Berdasarkan gambar 1, Menunjukkan bahwa sosialisasi dan bimbingan teknis telah dilaksanakan di Kelurahan Petahunan, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan. Kegiatan ini diikuti oleh Dinas Kesehatan dan pengurus Posyandu Remaja. Selain itu, gambar tersebut juga membuktikan bahwa program Posyandu Remaja di Kelurahan Petahunan, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan sudah berjalan dengan baik dan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Partisipasi aktif dari Dinas Kesehatan dan struktur kepengurusan Posyandu Remaja menunjukkan komitmen dalam mendukung kesehatan remaja di Kelurahan Petahunan, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan.

Kejelasan, George Edward III menyatakan bahwa agar suatu kebijakan bisa dijalankan dengan baik, instruksi pelaksanaannya harus mudah dipahami dan diterima oleh para pelaksana. Selain itu, cara menyampaikan kebijakan tersebut harus jelas dan tidak membingungkan [12]. Oleh karena itu, komunikasi harus jelas dan tidak memberikan kesempatan untuk penafsiran yang berbeda-beda oleh para pelaksana. Diperlukan ketepatan dan keakuratan dalam menyampaikan informasi kebijakan [11]. Dengan adanya kejelasan ini, para remaja tidak akan lagi bingung mengenai jadwal pelaksanaan posyandu remaja yang sering tidak pasti. Jadwal akan disampaikan melalui undangan atau dibagikan melalui grup WhatsApp, sehingga mereka selalu mendapat informasi yang tepat tentang pelaksanaannya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh wahyu julianto selaku peserta dari posyandu remaja di Kelurahan Petahunan Kota Pasuruan.

“Posyandu remaja dilakukan dua kali dalam setahun mba tetapi tidak mempunyai jadwal yang pasti seperti bulan maupun tanggalnya mbak, sehingga Bu Sri rahayu, S.A.B selaku ketua dari posyandu remaja membuat grub untuk para pserta remaja mbak, untuk yang tidak mempunyai hp akan diantarkan undangan ke rumahnya”.

Wawancara tersebut dilakukan pada tanggal 28 September 2023. Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa posyandu remaja di Kelurahan Petahunan, Kota Pasuruan, dilaksanakan sebanyak dua kali dalam setahun. Namun, kegiatan ini tidak memiliki jadwal yang tetap, yang dapat menyebabkan kebingungan di kalangan remaja. Untuk mengatasi masalah ini, telah dibuat grup WhatsApp sebagai sarana untuk memberikan informasi mengenai jadwal pelaksanaan posyandu remaja. Selain itu, setiap remaja juga akan menerima undangan agar mereka dapat lebih mudah mengetahui dan mempersiapkan diri. Dengan langkah ini, diharapkan komunikasi mengenai pelaksanaan posyandu remaja menjadi lebih efektif dan semua pihak dapat terinformasi dengan baik. Di bawah ini adalah gambar undangan posyandu remaja di kelurahan petahunan kecamatan gadingrejo kota pasuruan.

Gambar 2. Undangan Posyandu Remaja dan Penyuluhan Kelurahan Petahunan

program Posyandu remaja di Kelurahan Patahunan, Kota Pasuruan, sudah terlaksana. Namun, masih terdapat kekurangan, seperti ketidakaturan jadwal Posyandu remaja yang belum konsisten karena pelaksanaannya masih bergantung pada jadwal yang ditentukan oleh dinas kesehatan. Temuan ini sesuai dengan penelitian terdahulu oleh Hafis Aldani Posangi, Florence D. J. Lengkong, Salmin Dengo (2020), berjudul Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Dilakukan Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa komunikasi kebijakandalam penyampaian informasi mengenai pelayanan administrasi sudah terlaksana dan berusaha konsisten serta saling berkoordinasi dalam pelaksanaannya, meskipun ada kendala namun sudah berusaha untuk mengkomunikasikan informasi dengan baik.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor yang memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan Setelah adanya komunikasi yang baik sehingga program terbentuk maka butuh adanya sumber daya yang memadai. Indikator sumber daya yang dikemukakan oleh Edward III yaitu : sumber daya manusia, sumber daya peralatan dan anggaran, dan wewenang. Namun peneliti disini hanya menggunakan sub indikator sumber daya manusia, sumber daya peralatan, dan kewenangan.

Sumber daya manusia merupakan aset yang sangat berharga bagi organisasi dan menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.[11] Salah satu penyebab kegagalan dalam implementasi kebijakan adalah ketidakmampuan dan kekurangan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya. Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga kekurangan dalam aspek ini dapat menghambat tercapainya tujuan kebijakan yang diharapkan.[11] Sebaliknya, apabila sumber daya manusia yang dimiliki berkinerja baik, implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan secara optimal.[11] Untuk melaksanakan kegiatan posyandu remaja, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten. Sumber daya manusia dalam program posyandu remaja meliputi remaja sebagai sasaran program di Kelurahan Petahunan. Sumber daya manusia di posyandu remaja sudah cukup memadai. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Asih Ibu selaku Bu lurah di kelurahan Petahunan .

“untuk sumber daya manusia sendiri kita ada petugas yang bertugas dalam setiap pertemuan yaitu 4 petugas dan 1 bidan. Biasanya juga ada narasumber yang datang untuk mengisi materi pertemuan, seperti pihak KUA setempat, PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana)”

Tabel 2.1
Sistem Informasi Pelaksana Posyandu Remaja Kelurahan Petahunan Kota Pasuruan

No.	Nama	Jabatan	Posisi
1.	Retha Martha	Bidan	Dinas Kesehatan
2.	Sri Rahayu	Ketua	Pelaksana
3.	Muharnik	PLKB	Pelaksana
4.	Badrus Salam	KUA	Pelaksana
5.	Asih	Bu Lurah	Pelaksana

Sumber: Data Posyandu Remaja Kelurahan Petahunan

wawancara tersebut dilakukan pada tanggal 28 september 2023, Berdasarkan wawancara tersebut, terbukti bahwa sumber daya manusia di posyandu remaja Kelurahan Petahunan memiliki kemampuan yang memadai untuk melaksanakan kinerjanya dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa mereka mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan efektif dan efisien, sehingga program posyandu remaja dapat berjalan dengan optimal.

Sumber daya fasilitas dan anggaran, Sumber daya fasilitas dan anggaran sangat penting bagi setiap organisasi, karena ketersediaan fasilitas yang memadai dan berkualitas diperlukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Infrastruktur berfungsi sebagai elemen pendukung yang memfasilitasi proses koordinasi antara pelaksana, sehingga dapat mengatasi berbagai permasalahan dalam pengelolaan dengan lebih efektif.[3] Terkait dengan fasilitas Bu Sri rahayu, S.A.B. Selaku ketua dari Posyandu Remaja di Kelurahan Petahunan Kota Pasuruan menjelaskan bahwa.

“Kendala lain yang kita hadapi saat ini yaitu semakin turun jumlah remaja yang ikut posyandu remaja mbak, mungkin karena sarana dan prasarananya yang masih sederhana dan belum memupuni sehingga remaja menjadi kurang minat untuk mengikuti kegiatan”

wawancara dilakukan pada tanggal 28 september 2023, Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua program posyandu remaja yang ada di kelurahan petahunan sumber daya anggaran masih belum maksimal hal tersebut dibuktikan dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai di posyandu remaja. Fasilitas pendukung kegiatan posyandu remaja masih minim. Seperti alat-alat untuk cek kesehatan masih belum memadai. Dalam kegiatan cek kesehatan hanya dilakukan penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan dan pemeriksaan tekanan darah. Perlengkapan terkait peralatan

penunjang kegiatan posyandu remaja masih belum tersedia untuk pemeriksaan lingkaran perut dan lingkaran lengan atas, serta buku rapor kesehatan peserta remaja yang masih dalam perencanaan.

Kewenangan, Menurut Edward III Agar suatu perintah dapat dilaksanakan, wewenang biasanya harus bersifat formal. Wewenang adalah hak dan tanggung jawab pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditentukan secara politik. [11] Pada tahun 2020 posyandu remaja terbentuk di desa Petahunan kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan. Posyandu remaja kelurahan Petahunan sudah mendapatkan surat keputusan kelurahan dan kecamatan dan didukung oleh Walikota Pasuruan. Bu Sri rahayu, S.A.B. Selaku ketua dari Posyandu Remaja di Kelurahan Petahunan Kota Pasuruan menjelaskan melalui wawancara pada tanggal 23 september 2023 bahwa

“Posyandu remaja sendiri awal pencetus idenya yaitu wali kota pasuruan bapak Drs. K.H. Saifullah Yusuf, S.I.P. kemudian turun surat keputusan untuk kelurahan Petahunan mendirikan posyandu remaja”.

Wawancara tersebut dilakukan pada tanggal 28 september 2023. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua program posyandu remaja yang ada di kelurahan petahunan bahwa kewenangan yang diberikan kepada kelurahan Petahunan mengacu pada surat keputusan yang didukung oleh bapak Wali Kota Pasuruan. Temuan ini sesuai dengan penelitian terdahulu dengan judul implementasi program posyandu remaja pada kalangan remaja di kelurahan Sudajaya Hilir oleh Neneng Yanti Andriani, Yuana Sari, Siti Nanar Aryanti, Siti Fitriya Zaenal, Yusi Yustiani, dan Deva Sopiawati memiliki kesamaan terkait dengan sumber daya anggaran dimana karena anggaran yang belum maksimal sehingga menjadi kendala dalam adanya fasilitas dan sarana prasarana. Salah satu contohnya yaitu tersedianya alat-alat untuk mengecek kesehatan remaja.

3. Sikap atau Disposisi

Disposisi juga menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi. Disposisi dipengaruhi oleh tiga unsur, yaitu pemahaman tentang kebijakan, respon terhadap kebijakan, dan komitmen dalam menjalankan kebijakan tersebut. Hal ini bermakna bahwa pelaksana tidak hanya memahami dan mengetahui apa saja tupoksinya tetapi juga memiliki kemauan dan komitmen untuk melaksanakan program atau kebijakan. Sikap atau Disposisi merupakan keinginan dan kecenderungan pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan dengan sungguh-sungguh guna mencapai tujuan kebijakan.[8] Untuk mencapai program yang berhasil maka diperlukan adanya keinginan yang kuat agar program bisa terlaksana dengan baik. **Pemahaman** yang baik mengenai program atau kebijakan perlu dimiliki seluruh pelaksana. Indikator selanjutnya yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan yaitu adanya **respon** yang baik dari para pelaksana untuk bersedia melaksanakan kebijakan. Kebijakan tidak akan berhasil apabila para pelaksana memiliki perbedaan pendapat dan kurang mendukung untuk melaksanakan kebijakan. Terakhir yaitu selain respon yang baik, perlu adanya **komitmen** dari para pelaksana yang terlibat untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Bu Sri rahayu, S.A.B. Selaku ketua dari Posyandu Remaja di Kelurahan Petahunan Kota Pasuruan menjelaskan melalui wawancara pada tanggal 15 Januari 2024, sebagai berikut.

“dalam program posyandu remaja ini kita ingin agar program ini berjalan dengan baik mbak, sebelum pelaksanaan kita coba untuk menjelaskan bagaimana skema program posyandu remaja ini ke depannya, kita juga memberikan pelatihan dan bimbingan kepada kader posyandu agar saat pelaksanaan bisa maksimal dan hasilnya bagus. kemudian dalam pelaksanaannya kita berusaha untuk sebaik mungkin karena sebagaimana yang kita ketahui disini masih ada permasalahan seperti pernikahan dini. Kita inginnya program posyandu remaja ini bisa berjalan dengan maksimal sehingga pernikahan dini disini bisa menurun. Kita setiap selesai kegiatan pasti akan mengadakan evaluasi bersama karena ada grup internal juga. Selain para remaja kita juga berusaha untuk mengajak serta orangtua dari remaja untuk bisa merangkul dan memberikan sosialisasi terkait pola asuh yang tepat khususnya yang memiliki anak usia remaja.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sikap atau Disposisi yang tergambar pada posyandu remaja di kelurahan petahunan sudah baik. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya koordinasi antar pihak terkait pelaksana program, seperti yang dijelaskan ada evaluasi setiap pelaksanaan program, hal tersebut merupakan upaya yang baik karena adanya keinginan untuk menjadikan program posyandu remaja menjadi lebih baik lagi kedepannya. Berdasarkan hasil wawancara tidak hanya remaja selaku sasaran program tetapi orang tua remaja juga ikut meluangkan waktunya untuk datang dan mengikuti program dengan baik. Hal tersebut merupakan hal yang baik karena masyarakat mulai tertarik dan ingin belajar melalui program posyandu remaja. Materi menarik tentang pola asuh orang tua yang baik juga bisa merubah perilaku masyarakat untuk bisa menjadi orangtua yang lebih baik lagi. Temuan ini sesuai dengan penelitian terdahulu dengan judul Gambaran Pelaksanaan Posyandu Remaja Di Kelurahan Panggung Kidul Kecamatan Semarang Utara ditulis oleh Laila Wahid, Ratih Indraswari, Zahroh Shaluhiyah, dan Bagoes Widjanarko tahun 2020 yaitu menyatakan bahwa pemahaman, respon, komitmen, dan pelatihan cukup efektif meningkatkan keterampilan dan kapasitas kader posyandu,

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan instrumen yang diciptakan untuk menangani keperluan-keperluan publik. Dengan adanya struktur birokrasi maka implementasi kebijakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya.[8] Dua karakteristik yang menonjol dari birokrasi adalah prosedur standar operasi (SOP) dan fragmentasi. Struktur birokrasi ini dikembangkan sebagai respon internal akan waktu dan pelaksana sumber daya yang terbatas dan dimaksudkan untuk membakukan pekerjaan pada organisasi yang kompleks dan luas. Edward III (1980) mengemukakan pengertian SOP yaitu berbagai rutinitas yang memungkinkan pihak otoritas membuat berbagai keputusan harian. Menurut Winarno (2014) bahwa keberadaan SOP diharapkan agar para pelaksana kebijakan dapat memanfaatkan waktu yang tersedia, menyeragamkan tindakan dari para pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas sehingga akan menimbulkan fleksibilitas yang besar serta agar terjadinya suatu kesamaan dalam penerapan peraturan-peraturan.[14] Menurut Edward III (1980) bahwa penyebaran tanggung jawab pada satu lingkup kebijakan diantara beberapa unit organisasi disebut dengan fragmentasi. Dimensi fragmentasi menurut Widodo (2013) menegaskan bahwa struktur birokrasi yang terfragmentasi dapat meningkatkan gagalnya komunikasi karena akan membatasi kemampuan para pejabat tinggi untuk mengkoordinasikan semua sumber daya yang relevan dan akibat lebih lanjut dapat menimbulkan terjadinya ketidakefisienan serta pemborosan sumber daya yang langka.[14]

Standard Operational Procedure, SOP merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas agar proses birokrasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien.[11] Bu Sri rahayu, S.A.B. Selaku ketua dari Posyandu Remaja di Kelurahan Petahunan Kota Pasuruan menjelaskan melalui wawancara

“di posyandu remaja ini belum ada SOP tertentu yang mengatur dengan ketat salah satu contohnya mengenai waktu pelaksanaan, waktu pelaksanaan program posyandu remaja dalam satu tahun bisa dua sampai tiga kali dalam satu tahun mbak, namun untuk waktu tepat pelaksanaannya masih belum dapat dipastikan tanggalnya, biasanya tanggalnya itu tergantung dari dinas kesehatan mbak, jadi kalau ada info maka akan dilaksanakan posyandu remaja pada tanggal sekian. Dalam pelaksanaan program masih kurang mbak terutama dari fasilitasnya, bisa dibilang masih belum memenuhi standart, sebagai contoh alat pemeriksaan kesehatan juga masih pinjam. Kedepannya saya berharap posyandu remaja bisa dilaksanakan lebih dari tiga kali dalam satu tahun agar lebih maksimal dan pesertanya bisa lebih banyak. Untuk tahun 2023 jumlah pesertanya turun dan itu menjadi tantangan bagi kami mbak. Untuk koordinasi pihak posyandu di lingkup kelurahan sudah berjalan namun untuk koordinasi dengan pihak yang lebih tinggi masih kurang karena seperti yang diketahui sarana dan prasarana masih belum maksimal dikarenakan sumber dana yang masih belum turun.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa posyandu remaja di Kelurahan Petahunan belum ada SOP Khusus dalam pelaksanaannya.

Fragmentasi, Fragmentasi merupakan ciri kedua yang termasuk dalam variabel struktur birokrasi. Fragmentasi juga mempengaruhi implementasi kebijakan. Fragmentasi adalah pembagian tanggung jawab suatu kebijakan diantara berbagai entitas yang berbeda, yang memerlukan koordinasi.[11] Bu Sri rahayu, S.A.B. Selaku ketua dari Posyandu Remaja di Kelurahan Petahunan Kota Pasuruan menjelaskan melalui wawancara menjelaskan

“kita ada kepengurusan anggota mbak, jadi sudah ada pembagian tugasnya masing-masing. adanya pihak dari lintas sektor cukup membantu dalam pelaksanaan posyandu remaja ini”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat fragmentasi struktur birokrasi, tidak adanya fragmentasi atau semakin sedikit maka implementasi kebijakan akan semakin baik. Temuan ini sesuai dengan penelitian terdahulu dengan hasil peneliti Qisty et al (2023) yang berjudul “Analisis implementasi program pelayanan kesehatan peduli remaja (PKPR) di puskesmas Siulak gedung Kabupaten Kerinci ditulis oleh Letxya Qisty, Fadlan Kalma, dan Mat Ramawi tahun 2023” kerjasama yang baik dari banyak orang dapat mendorong keberhasilan implementasi kebijakan, oleh sebab itu, fragmentasi dapat merintangangi koordinasi yang diperlukan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan serta dapat memicu pemborosan sumber daya yang terbatas. Posyandu remaja di Kelurahan Petahunan perlu adanya SOP dalam pelaksanaannya agar memiliki prosedur yang teratur sehingga program bisa berjalan dengan baik dan maksimal.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Program Posyandu Remaja Di Kelurahan Petahunan Kota Pasuruan sudah dilakukan dengan baik, tetapi masih ada kekurangan. Terkait dengan komunikasi, kader posyandu remaja di dalam memberikan informasi terkait pelaksanaan program sudah baik. Kemudian terkait sumber daya anggaran yang berdampak pada fasilitas dan sarana prasarana penunjang kegiatan. Sarana dan prasarana sangat penting dalam menunjang pelaksanaan program posyandu remaja ini. alat cek kesehatan yang ada di posyandu remaja kelurahan petahunan masih belum memadai seperti alat cek lingkaran perut dan lingkaran lengan atas, serta buku rapor kesehatan. Selain itu posyandu remaja di kelurahan Petahunan juga belum memiliki SOP terstruktur yang

mengatur waktu pelaksanaan posyandu. Strategi posyandu remaja dilakukan dengan mengadakan pertemuan 2 sampai 3 kali dalam satu tahun juga masih perlu untuk ditingkatkan lagi. Adanya kendala dalam pelaksanaannya juga menjadi faktor menurunnya jumlah remaja yang mengikuti posyandu remaja di Kelurahan Petahunan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Berkat nikmat, rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan jurnal Implementasi Program Posyandu Remaja di Kelurahan Petahunan Kota Pasuruan. Selesaiannya jurnal ini, bukanlah akhir, melainkan awal dari petualangan hidup baru. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terdapat pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam selesainya jurnal ini. Tidak ada persembahan yang lebih besar bagi penulis selain mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah membantunya. Penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Sri rahayu, S.A.B. Selaku ketua dari Posyandu Remaja di Kelurahan Petahunan Kota Pasuruan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meneliti Posyandu Remaja Di Kelurahan Petahunan. Ucapan terimakasih juga saya persembahkan kepada kedua orangtua saya, dan pihak-pihak yang membantu memberikan support untuk saya selama mengerjakan penelitian ini. Begitu pula dengan rekan-rekan seperjuangan saya yang tidak segan-segan membantudan menyemangati penulis. Dan meskipun penulis tidak dapat menyebutkan nama satu per satu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam jurnal ini.

Terlepas dari segala kekurangan dan ketidaksempurnaan jurnal ini, penulis dengan tulus menyambut baik segala masukan, kritik, dan saran yang membangun untuk perbaikan dan penyempurnaan jurnal ini. Banyak kesulitan yang penulis hadapi saat membuat jurnal ini, namun alhamdulillah berhasil diselesaikan. Akhir kata, penulis berharap semoga jurnal ini dapat bermanfaat bagi semua orang yang terlibat dan semoga menjadi amal baik.

REFERENSI

- [1] Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna (ed.); Cetakan 1). Syakir Media Press.
- [2] Amelya, A. L., Supriyono, B., & Mardiyono. (2020). *Di badan kepegawaian daerah kota pasuruan*. 7(1), 1–7.
- [3] Andriani, Y. N., Sari, Y., Nanar Aryanti, S., Fitriya Zaenal, S., Yustiani, Y., & Sopiawati, D. (2023). Implementasi Program Posyandu Remaja Pada Kalangan Remaja Di Kelurahan Sudajaya Hilir. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 82–89. <https://doi.org/10.59820/pengmas.v1i2.52>
- [4] Anggiawati, F. (2023). Yoga Andika: Geber Posyandu Remaja untuk Masa Depan Indonesia. *Viva.Co.Id*.
- [5] Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Badan Pusat Statistik, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, & USAID. (2012). *Survei demografi dan kesehatan indonesia 2012*. 444. [https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR218/FR218\[27August2010\].pdf](https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR218/FR218[27August2010].pdf)
- [6] Menteri, P. K. R. I. T. 2014. (2014). *PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2014*. 85(1), 2071–2079. [https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/108349/Permenkes Nomor 25 Tahun 2014.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/108349/Permenkes%20Nomor%2025%20Tahun%202014.pdf)
- [7] Qisty, L., Kalma, F., & Ramawi, M. (2023). Analisis Implementasi Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (Pkpr) Di Puskesmas Siulak Gedang Kabupaten Kerinci. *Jurnal Administrasi Nusantara Maha*, 5(2), 2023. <http://lppmstianusa.com/ejurnal/index.php/janmaha/article/view/704%0Ahttp://lppmstianusa.com/ejurnal/index.php/janmaha/article/download/704/489>
- [8] Tachjan, H. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik* (D. Mariana & C. Paskarina (eds.); Cetakan 1). AIPI Bandung.
- [9] Wahid, L., Indraswari, R., Shaluhiah, Z., Widjanarko, B., Masyarakat, F. K., & Diponegoro, U. (2020). *Gambaran pelaksanaan posyandu remaja di kelurahan panggung kidul kecamatan semarang utara*. 8.
- [10] Wikipedia. (2023). *Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Pasuruan*. Wikipedia.Id.

- [11] Winarno (2005:150),. Page 14. 23. "Standard operational procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya ...
- [12] POSANGI, H., LENGKONG, F., & DENGGO, S. (2020). *Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Dilakukan Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow*. 19(11), 1649–1654. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/29824/28879>
- [13] Maulidia, F. M. (2018). Pengaruh Struktur Birokrasi terhadap Implementasi Kebijakan Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR). *Jurnal Ilmiah Kesehatan Media Husada*, 6(2), 183–192. <https://doi.org/10.33475/jikmh.v6i2.37>
- [14] Yohanis Sallolo¹, Sofjan Aripin², Djoko Raharjo³ (2022) "Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen (SIM-Siluhtan) dalam Pelaksanaan Program Dekonsentrasi Penyuluhan Pertanian di Provinsi Kalimantan Utara"
- [15] N. Bloom and J. Van Reenen, "濟無No Title No Title No Title," NBER Work. Pap., p. 89, 2013, [Online]. Available: <http://www.nber.org/papers/w16019>

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.